

PENDAMPINGAN GURU SMA DAN SMK DALAM KEBIJAKAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

THE ASSISTENCE OF HIGH SCHOOL TEACHERS IN DISTANCE LEARNING POLICIES IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

Oleh: Nibras Putri Mumpuni, Universitas Negeri Yogyakarta
nibrasputri.2018@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendampingan guru SMA dan SMK dalam kebijakan pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan menggunakan sudut pandang teori implementasi kebijakan Edward III. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas Dikpora DIY) dan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Tekkomdik) DIY. Subjek dari penelitian ini merupakan pelaksana Program Kebijakan dan Guru peserta pendampingan Menyimpulkan program pendampingan guru dalam kebijakan pendidikan jarak jauh telah diimplementasikan sesuai dengan teori implementasi Edward III Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur dalam Pendampingan Guru pada Kebijakan Pendidikan Jarak Jauh di DIY dilaksanakan dengan sesuai dengan tujuan meskipun memerlukan beberapa perbaikan.

Kata kunci: Pendampingan Guru, Pembelajaran Jarak Jauh, Implementasi kebijakan

Abstract

This study aims to describe the assistance of secondary school teachers in distance learning policies during the Covid-19 pandemic in the Special Region of Yogyakarta using the theoretical point of view of the Edward III's policy implementation. This research method uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation conducted at the Education, Youth, and Sports Office of the Special Region of Yogyakarta and the Bureau of Technology, Communication and Education of D. I Yogyakarta (Tekkomdik). The results of this study show how the implementation of the assistance of high school teachers in distance learning policies during pandemic covid-19. It shown from several aspect such as (1) Communication (2) Resources (3) Disposition and (4) Structure in Teacher Assistance on Distance Education Policy.

Keywords: Teacher Assistance, Distance Learning, Policy Implementation.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap keberlangsungan pendidikan. Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini telah menyebabkan penutupan sekolah secara global secara serentak untuk semua sistem pendidikan di dunia terparah sepanjang sejarah (World Bank, 2020). Kondisi masa pandemi Covid-19 memaksa

pendidikan untuk dapat beradaptasi. Akibatnya, proses pencapaian tujuan pendidikan sebagaimana amanah konstitusi belum mampu tercapai secara optimal. Kompleksitas permasalahan dunia pendidikan selama menghadapi masa pandemi Covid-19 mendorong untuk bertransformasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan signifikan sehingga

mendorong keharusan untuk beradaptasi dengan berbagai pihak atas perubahan tersebut. Namun, pola adaptasi yang telah ditetapkan untuk memaksimalkan kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi ini belum mampu mengatasi akar masalah secara menyeluruh. Pernyataan tersebut terbukti dengan munculnya persoalan-persoalan yang terkait dengan kebijakan pendidikan untuk mengatasi dampak pandemi dalam bidang pendidikan.

Kebijakan sebagai respon yang dapat dikategorikan menjadi tiga kategori antara lain: (i) *coping policies*, selama sekolah ditutup; (ii) kebijakan untuk manajemen keberlangsungan, untuk dibukanya kembali sekolah, (iii) kebijakan untuk mengembangkan dan mengakselerasi pembelajaran, yang harus dimulai saat ini dan berlanjut setelah sistem stabil dan pembukaan sekolah secara permanen (World Bank, 2020).

Berbagai strategi pemerintah dalam menangani permasalahan pendidikan di masa pandemi Covid-19 khususnya dampak pelaksanaan pembelajaran daring (dalam jaringan) oleh peserta didik, mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang relevan. Dalam hal ini tertuang dalam kebijakan pendidikan yang dilahirkan pemerintah di tengah usaha penanganan Covid-19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan surat edaran sebagai bentuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kemendikbud instruksi pencegahan perkembangan dan penyebaran Covid-19 kepada satuan pendidikan. Selanjutnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem

Makarim dari Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan merupakan panduan pencegahan perkembangan dan penyebaran Covid-19 kepada satuan pendidikan (200302-SE-Mendikbud-No.-2-Tahun-2020-Ttg-Pencegahan-Dan-Penanganan-COVID-19-Di-Kemendikbud-1.Pdf, n.d.).

Berikutnya, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) dijelaskan mengenai Ujian Nasional (UN), ketentuan proses belajar dari rumah, ketentuan ujian sekolah untuk kelulusan, ketentuan kenaikan kelas, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), penggunaan dana bantuan operasional sekolah.

Kebijakan tersebut memberikan keleluasaan bagi aktor kebijakan unit instansi pendidikan dalam menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik sehingga pemenuhan hak siswa atas pendidikan di tengah wabah Covid-19 tetap menjadi prioritas. Kurikulum darurat juga memiliki manfaat agar peserta didik dan pendidik bersama-sama aktif dalam menetapkan metode belajar yang dapat sesuai dengan kebutuhan akademik baik kognitif maupun afektif peserta didik. Namun, usaha-usaha yang telah dirancang sedemikian rupa pada akhirnya masih menimbulkan polemik. Perubahan keadaan yang begitu tiba-tiba sulit diterima oleh pendidik maupun peserta didik.

Pembelajaran jarak jauh memiliki sejumlah hambatan antara lain terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, arahan pemerintah daerah yang kurang jelas, kurangnya kurikulum yang sesuai, dan keterbatasan sarana dan prasarana, terutama dukungan teknologi dan akses

internet. Kesiapan sumber daya manusia diantaranya pendidik (guru dan dosen), peserta didik, dan dukungan orang tua merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan PJJ. Banyak tenaga pendidik yang mengeluhkan keterbatasan fasilitas teknologi, kapasitas operasional dan jaringan internet di beberapa daerah (Arifa, 2020).

Guru memegang peranan besar dalam pembelajaran jarak jauh. Hal ini dapat dilihat melalui studi Bozkurt & Sharma (2020) yang mengemukakan bahwa pembelajaran jarak jauh yang efektif terdiri dari pengajaran dan pembelajaran daring, peningkatan beberapa karya penelitian, prinsip, *prototype*, teori, etika, dan penilaian konsentrasi tolok ukur pada desain pendidikan daring berkualitas, pengajaran dan pembelajaran. Guru dapat dikatakan memiliki tantangan besar dalam pembelajaran jarak jauh. Tantangan guru dalam mengajar daring selama pembelajaran daring diantaranya berkaitan dengan kendala teknis pengajaran daring, partisipasi siswa dalam pembelajaran, pengondisian siswa, pengalaman mengajar daring (Aliyyah, 2020).

Menghadapi kendala dalam pembelajaran jarak jauh, pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan pedoman pendidikan di masa pandemi Covid-19. Melalui pedoman tersebut dijelaskan bagaimana pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta mulai beradaptasi dengan situasi dan kondisi Covid-19. Empat usaha pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya pengoptimalan pembelajaran jarak jauh, diantaranya: (1) Penyediaan koneksi Internet sekolah (koordinasi dengan Dinas Kominfo DIY); (2) Penguatan kompetensi GTK dalam PJJ melalui webinar dan

pelatihan/ bimtek; (3) Layanan *e-learning* JOGJA BELAJAR; (4) Penyediaan konten pembelajaran digital. Poin kedua, merupakan salah satu usaha pemerintah berkaitan dengan kendala yang dihadapi guru atau dapat disebut pendampingan guru.

Pendampingan guru menjadi penting melihat bahwa guru mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi guru meliputi (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi profesional, (3) kompetensi kepribadian dan (4) kompetensi sosial. Istilah kompetensi pada Ketentuan Umum pasal 1 butir 10 pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005, ialah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya (Depdiknas.2005). Guru dituntut untuk terus menerus mengembangkan keahlian dan keterampilan sesuai perkembangan jaman kaitannya dengan peran guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Rusdarti, R., Slamet, A., & Prajanti, S. D. W.,2019).

Urgensi pendampingan guru dapat dilihat dari penelitian Aslan dan Zhu (2018) yang melakukan penelitian terhadap 600 guru pra-jabatan di Turkey. Dalam penelitian tersebut mengemukakan pentingnya pelatihan guru pra-jabatan

tentang penggunaan teknologi secara efektif dengan harapan bahwa ini akan tercermin dalam praktik pengajaran mereka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa menyediakan guru pra-jabatan dengan pengetahuan pedagogis yang memadai dan menyesuaikan program pelatihan yang efektif tentang penggunaan teknologi akan mendorong integrasi dalam praktik pengajaran mereka. Kebutuhan memberikan informasi dan praktik yang cukup kepada guru prajabatan tentang cara menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan pedagogis. Pelaksanaan program pendampingan guru pada pandemi Covid-19 memiliki urgensi besar kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Program pendampingan guru sebagai upaya optimalisasi peran guru pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Namun, pada kenyataannya hal ini belum diteliti dan dievaluasi.

Penelitian ini berfokus pada pendampingan guru menengah oleh pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada pelaksanaan pendidikan jarak jauh di masa pandemi Covid-19. Hasil prapenelitian Oktober 2021 menyimpulkan bahwa sumber mengalami kesulitan sekaligus memiliki peranan besar dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pendampingan guru SMA dan SMK pada kebijakan pembelajaran jarak jauh di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas Dikpora DIY) dan Balai Teknologi, Komunikasi dan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (Balai Tekomdik DIY) pada Bulan Oktober 2021 hingga September 2022.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini dipilih menurut tujuan penelitian yang dipilih menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah subjek yang sengaja dipilih oleh peneliti, dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi dan kriteria data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini merupakan hasil kegiatan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dilaksanakan sepanjang bulan Oktober 2021 hingga September 2022 terhadap 10 informan sebagai sumber informasi program pendampingan guru pada pelaksanaan PJJ di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun Subjek dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi SMA Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta; Kepala Seksi PKPP Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta; Staf Seksi SMK Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta; Kepala Seksi Layanan dan Promosi Balai Tekkomdik; Pengembang Teknologi Pembelajaran Balai Tekkomdik; dan Guru Peserta Pendampingan Guru.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian pada penelitian, hal tersebut didasarkan pada

metode kualitatif yang digunakan sehingga peneliti berfungsi sebagai penentu fokus sumber penelitian, pengumpulan data, penafsiran, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Peneliti dibantu dengan alat berupa catatan lapangan, pedoman wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan teknik dari Miles, Huberman, dan Saldana antara lain kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data berfungsi dalam menemukan hasil penelitian yang tajam, sistematis dan padat.

1) Kondensasi Data

Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12) mengemukakan kondensasi data dalam penelitian kualitatif berlangsung selama proses penelitian, baik selama pengumpulan data, sebelum laporan akhir

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai uji keabsahan data. Triangulasi sumber dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Pelaksana, dan Guru Peserta untuk menggali proses pendampingan guru SMA

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini merupakan hasil kegiatan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dilaksanakan sepanjang bulan Oktober 2021 hingga September 2022 terhadap 10 informan sebagai sumber informasi program pendampingan guru pada pelaksanaan PJJ di Daerah Istimewa Yogyakarta. Deskripsi hasil dan

Dilihat melalui teori Edward III kebijakan dapat terlaksana dengan baik, apabila komunikasi berjalan efektif antara pelaksana program (kebijakan) dan para

tersusun secara lengkap, atau bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan. Peneliti menyelesaikan penelitian ini dengan menyusun informasi yang ada dan beragam serta memilih dan mengelompokkannya menjadi data yang lebih penting, bermakna, dan relevan dengan tujuan penelitian.

2) Penyajian Data

Penyajian data sebagai ranglaian Teknik analisis dengan menjabarkan hasil temuan pada proses pendampingan guru SMA dan SMK masa pemberlakuan kebijakan pembelajaran jarak jauh pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah menganalisis data yang dikumpulkan hingga mencapai data yang padat dan komperhensif yang kemudian melakukan sintesis menjadi akhir kesimpulan data yang utuh.

dan SMK pada kebijakan pembelajaran jarak jauh masa pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara triangulasi teknik dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk memeperkuat data dan informasi ditemukan di lapangan

pembahasan penelitian ini meliputi proses pendampingan guru yang dikaji dengan teori implementasi Edward III. Teori Edward III pada penelitian ini meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi pada pendampingan guru Kebijakan PJJ di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Komunikasi Pendampingan Guru

kelompok sasaran. Perlunya sosialisasi tentang tujuan dan sasaran dari program untuk meminimalisasi distorsi terhadap kebijakan dan program. Edward II

menyebutkan komunikasi kebijakan terdiri dari tiga aspek antara lain, penyaluran (transmisi), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi.

Penyaluran atau transmisi komunikasi merupakan proses penerusan informasi kebijakan secara sistematis dan akurat agar tujuan kebijakan dapat terimplemetasikan dengan baik kepada sasaran kebijakan. Penyaluran komunikasi dalam pendampingan guru Kebijakan PJJ pada pandemi Covid-19 berkaitan dengan sosialisasi informasi dari pihak penyelenggara yakni Balai Tekkomdik di bawah Dinas Dikpora kepada guru selaku sasaran kebijakan. Aspek yang diperlukan pada penyaluran komunikasi antara lain, proses sosialisasi, media yang digunakan, dan koordinasi antarpihak terkait dalam pendampingan guru pada Penyaluran komunikasi dalam pendampingan guru dilakukan oleh Balai Tekkomdik dan Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta kepada sekolah dan guru SMA-SMK.

Penyaluran komunikasi dalam pendampingan guru Kebijakan PJJ pada pandemi Covid-19 memanfaatkan media sosial dengan memaksimalkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Media yang digunakan pada penyaluran komunikasi dalam pendampingan guru Kebijakan PJJ adalah instagram dan laman resmi milik Balai Tekkomdik. Koordinasi dengan Balai Dikmen sebagai penanggungjawab pendidikan menengah di Kabupaten dan Kota merupakan salah satu bentuk penyaluran komunikasi dengan koordinasi berjenjang. Balai Dikmen menghimpun sekolah-sekolah di wilayahnya menjadi salah satu bentuk optimalisasi koordinasi pada penyaluran komunikasi kebijakan. Pelibatan MGMP dan MKKS berperan besar dalam penyaluran komunikasi

pendampingan guru Kebijakan PJJ pandemi Covid-19.

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai himpunan guru memegang peranan strategis untuk meningkatkan dan memperkuat kompetensi guru melalui diskusi dan pelatihan secara langsung turut andil dalam pendampingan guru. Hal ini berkaitan dengan peran utama MGMP dalam memfasilitasi guru dalam mengembangkan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi Covid-19. MKKS merupakan forum himpunan kepala sekolah dalam satu gugus wilayah. MKKS dengan jumlah anggota kepala sekolah secara efektif membantu Balai Tekkomdik dan Dinas Dikpora menyampaikan kepada guru di sekolah mereka mengenai pendampingan guru. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab terhadap guru dan pembelajaran jarak jauh di sekolahnya, oleh karena itu kepala sekolah mendorong penyuksesan pendampingan guru.

Penyaluran komunikasi pendampingan guru Kebijakan PJJ pada pandemi Covid-19 melalui proses sosialisasi, media informasi, dan koordinasi antarpihak pada pendampingan guru berjalan baik dan cukup efektif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sosialisasi penyaluran informasi pendampingan guru dengan memanfaatkan media sosial dan koordinasi berbagai pihak terkait mengoptimalkan proses penyaluran informasi. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya program secara maksimal dan peserta merasakan dampak dari program tersebut, serta informasi dapat dipahami secara maksimal dengan skema penyaluran yang dilaksanakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyaluran komunikasi pendampingan guru Kebijakan PJJ pada

pandemi Covid-19 menjadi aspek penting dalam sebuah kebijakan dikarenakan penyaluran komunikasi menentukan keberhasilan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut.



Gambar 1. Sosialisasi Webinar Program Pendampingan Guru

Kejelasan komunikasi dalam implementasi suatu program atau kebijakan terdiri atas kejelasan petunjuk dan segala informasi terkait. Implementasi kebijakan akan berhasil secara efektif dan efisien apabila implementor tidak hanya sekedar mengetahui apa yang harus mereka lakukan tetapi memiliki pemahaman yang kompleks terhadap implementasi kebijakan tersebut. Kejelasan komunikasi pada kebijakan berkaitan dengan informasi dan petunjuk yang jelas dan tentunya mudah dipahami oleh semua pihak. Ketidajelasan komunikasi dapat memicu terjadinya kesalahan dalam implementasi. Ketidajelasan komunikasi akan berdampak pada ketidaktepatan gambaran terhadap objek kebijakan serta kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan.

Kejelasan informasi pada pendampingan guru dalam pendampingan guru Kebijakan PJJ pada pandemi Covid-19 berkaitan dengan sosialisasi informasi dari pihak penyelenggara yakni Balai Tekomdik di bawah Dinas Dikpora kepada guru selaku sasaran kebijakan. Sosialisasi memiliki peranan penting dalam kejelasan informasi pendampingan guru.

Kejelasan komunikasi pada sosialisasi pendampingan guru ditekankan pada dua hal yakni prosedur pendampingan guru dan komunikasi antarpihak terkait. Prosedur pendampingan guru dilakukan dengan proses yang jelas dan mudah dipahami oleh guru.

Balai Tekomdik mengkomunikasikan prosedur melalui media sosial dan laman dengan penjelasan jelas dan mudah dipahami dengan alur yang singkat dan dapat diakses oleh seluruh sasaran. Melalui hasil wawancara dari para guru, prosedur pendampingan guru dapat dikatakan berhasil sesuai dengan teori Edward III mengenai kejelasan komunikasi. Koordinasi antarpihak juga memiliki peran dalam kejelasan komunikasi yang terjadi pada pendampingan guru Kebijakan PJJ. Sebuah kebijakan dan instruksi implementasi harus ditransmisikan kepada personel-personel yang tepat sebelum dilaksanakan. Komunikasi semacam ini harus akurat dan harus dipahami oleh para pelaksana. Koordinasi intensif secara berkala berperan meminimalisir adanya miskomunikasi dan memaksimalkan efektivitas komunikasi. Komunikasi yang dilakukan bersifat saling menguntungkan setiap pihak yang terlibat karena pendampingan guru merupakan tanggung jawab bersama.

Konsistensi komunikasi pada konteks kebijakan merupakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konsistensi dari pelaksana. Konsistensi komunikasi dalam sebuah kebijakan terdiri atas sikap, persepsi, serta respon pelaksana dalam memahami kebijakan atau program yang dilaksanakan secara jelas dan benar. Chutz dan Larson (2006) dalam Wagner (2008:14) menjelaskan keharusan konsistensi dan kejelasan kebijakan sebagai konsep dasar dalam implementasi kebijakan. Konsistensi komunikasi

memengaruhi tingkat keefektifan implementasi kebijakan dan program yang dilaksanakan. Konsistensi pada pendampingan guru berkaitan dengan konsistensi informasi oleh pelaksana selama pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan.

Konsistensi komunikasi dalam pendampingan guru berkaitan dengan konsistensi informasi oleh pelaksana sebagai komunikator selama pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan kepada komunikan. Konsistensi informasi komunikasi pendampingan guru kebijakan PJJ melalui hasil penelitian dapat dikatakan cukup konsisten, dikarenakan secara keseluruhan informasi disampaikan dengan jelas, akurat, dan konsisten terjadi beberapa perubahan namun informasi langsung diinformasikan kepada sasaran. Minimnya miskomunikasi yang terjadi pada pendampingan guru berkaitan dengan konsistensi informasi oleh pelaksana selama pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan membuktikan konsistensi komunikasi yang cukup. Perubahan yang terjadi terkait dengan jadwal diatasi dengan pemberitahuan melalui media sosial kepada peserta yang telah mendaftar sebelumnya.

2. Sumber Daya Pendampingan Guru

Sumber daya pada kebijakan berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Edward III menjelaskan sumber daya penting dalam suatu kebijakan terdiri dari sumber daya manusia dengan proporsi ideal antara keahlian dan kebutuhan pada kebijakan, sumber daya berupa finansial sebagai pendukung implementasi, dan sumber daya berupa fasilitas berkaitan dengan bangunan, peralatan, tanah dan

persediaan di dalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak cukup akan berarti bahwa undang-undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan. Horn (Subarsono, 2005 :99) menyebutkan faktor dukungan sumber daya merupakan faktor yang dapat memengaruhi proses implementasi kebijakan. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakana kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif (Tahir, 2014).

Sumber daya manusia pada konteks kebijakan merupakan ketersediaan pelaku kebijakan sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan dengan keahlian dan kualifikasi yang sesuai dengan kebijakan. Grindle (1980) dalam Akib (2010) menjelaskan implementasi tidak lepas dengan pelaksanaannya. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Wagner (2008) memaparkan pelaku kebijakan memiliki peranan besar terhadap keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Horn (Hasbullah, 2015: 105) memaparkan karakteristik pelaksana kebijakan, daya tanggap dan kemampuan untuk menyesuaikan diri atau adaptasi merupakan faktor yang dapat memengaruhi proses implementasi.

Sumber daya manusia yang dapat memengaruhi proses implementasi dikategorikan melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan dan aktor individu

selaku kelompok target. Pada pendampingan guru kebijakan PJJ di masa pandemi Covid-19, sumber daya manusia apabila dilihat melalui perspektif tersebut antara lain pembuat kebijakan adalah Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai organisasi induk dan Balai Tekkomdik sebagai UPT pelaksana., pejabat pelaksana di lapangan merupakan tim teknis Balai Tekkomdik, aktor individu selaku kelompok target adalah guru sekolah menengah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia dalam pendampingan guru memiliki keterbatasan mengingat sasaran yang luas. Mengatasi keterbatasan secara kuantitas, Balai Tekkomdik memanfaatkan media dan bekerjasama dengan guru untuk menjangkau sasaran yang luas. Balai Tekkomdik menuturkan bahwa ketersediaan sumber daya berupa tim teknis dan jabatan fungsional sesuai dengan bidangnya. Ketersediaan sumber daya manusia yang cakap disesuaikan kebutuhan, berkaitan dengan TIK untuk menunjang kebijakan PJJ bagi guru. Kualifikasi pendidikan sumber daya manusia diantaranya merupakan Sarjana komputer dan jaringan, Sarjana Teknologi Pendidikan, Sarjana broadcasting, dan Sarjana administrasi. Pemahaman sumber daya manusia implementor yang terlibat dalam pendampingan guru sesuai dengan perencanaan kebijakan dan program.

Proporsi sumber daya manusia pada pendampingan guru di Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh tim teknis dan pengembang teknologi pembelajaran dari Balai Tekkomdik. Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan ketersediaan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang

dibutuhkan pada pendampingan guru di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendampingan guru Kebijakan PJJ dilaksanakan pada pandemi Covid-19 dimana pendanaan pemerintah beralih fungsi bagi penanganan tanggap darurat Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan terkait dengan ketersediaan dan alokasi dana disesuaikan dengan kebutuhan, mengingat dengan adanya pandemi Covid-19 sebagian besar dana dialokasikan untuk kebutuhan tanggap darurat Covid-19. Balai Tekkomdik mengatasi alokasi dana dengan Pendampingan guru memaksimalkan sumber daya manusia dan peralatan dari Balai Tekkomdik meminimalkan pengeluaran dana. Pemilihan Webinar memanfaatkan media *video conference* dan *Youtube* berperan besar untuk meminimalkan pengeluaran.

Sumber daya peralatan pendampingan guru merupakan sarana dan prasarana kegiatan daring. Saran dan prasarana kegiatan daring meliputi, perangkat komputer, peralatan *broadcasting*, *video conference*, media dan aplikasi daring. Komponen sumber daya peralatan pada pendampingan berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta kendala maupun evaluasi terkait sarana dan prasana. Sumber daya peralatan telah terintegrasi di Balai Tekkomdik dan pemanfaatan *live youtube* yang memudahkan guru mengikuti pendampingan guru tanpa harus meninggalkan tugas di sekolah, kekurangan bagi beberapa guru media yang kurang efektif karena beberapa masih sangat awam dengan media yang digunakan.

3. Disposisi Pendampingan Guru

Disposisi pada pendampingan guru terkait dengan sikap pelaksana yang tercermin pada komitmen implementor

berdasarkan hasil penelitian, komitmen dinyatakan dengan kegiatan sebagai bentuk program pendampingan guru. Balai Tekkomdik selaku pemerintah daerah yang bertugas memberikan pendampingan guru pada kebijakan pembelajaran jarak jauh mengadakan Bimtek dan Webinar sebagai bentuk komitmen nyata terhadap pendampingan guru. Pihak penyelenggara menyatakan sudah memenuhi sikap pelaksana yang dibutuhkan yaitu demokratis dan transparan terhadap guru dan pihak-pihak yang terlibat. Demokratis dan transparan pada pendampingan guru terwujud dengan sikap pelaksana terhadap kritik dan saran yang diberikan.

Insentif merupakan penghargaan kepada pelaksana capaian target kebijakan/program sebagai faktor pendorong tercapainya tujuan dengan baik. Penelitian pada pelaksana pendampingan guru menunjukkan bahwa tidak adanya insentif. Pelaksana memenuhi target capaian pendampingan guru sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pendampingan guru merupakan sebuah kewajiban bagi implementor, tidak ada keuntungan atau biaya tertentu yang diterima oleh implementor.

4. Struktur Birokrasi Pendampingan Guru

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan. Struktur birokrasi dalam implementasi mencakup aspek-aspek seperti pembagian kewenangan dan hubungan antara unit-unit organisasi. Dibutuhkan birokrasi pendidikan yang mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan memahami kebutuhan masyarakat yang dilayani. Kinerja birokrasi melalui responabilitas

harus terus ditingkatkan untuk menciptakan pelayanan prima terutama merespon kepentingan publik (Solichin, 2015).

Menurut Edwards III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu: *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi. *Standard Operational Procedure* (SOP) merupakan sistem prosedur kerja yang kompleks dan luas yang terstruktur. SOP berkaitan dengan prosedur atau kerangka kerja yang jelas, siapa yang bertindak, dicantumkan jelas tidak berbelit dan mudah dipahami untuk siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Fragmentasi merupakan pembagian wilayah tanggung jawab dalam suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dengan pelaksana, *Standard Operational Procedure* (SOP) pada pendampingan guru kebijakan PJJ mengikuti tugas pokok dan fungsi dari setiap pelaksana yang disesuaikan kebutuhan guru dalam pemberlakuan kebijakan PJJ. Pelaku *Standard Operational Procedure* (SOP) pendampingan guru terdiri atas Dinas Dikpora sebagai organisasi induk dan Balai Tekkomdik sebagai pelaksana. Balai Tekkomdik terdiri dari beberapa seksi dan jabatan fungsional, pada pendampingan guru Balai Tekkomdik memaksimalkan pelibatan seluruh staf sesuai tugas dan fungsi yang dibutuhkan terutama pada tim teknis Balai Tekkomdik. Fragmentasi dalam pendampingan guru pada pemberlakuan PJJ disesuaikan pada tugas fungsi dari setiap lembaga dan bagian. Tidak ada pembagian wilayah kerja atau tanggung jawab berdasarkan daerah-daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap bagian dalam pendampingan guru berkoordinasi satu sama lain.

5. Proses Pendampingan Guru

Pendampingan guru termasuk dalam empat usaha Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya pengoptimalan pembelajaran jarak jauh. Pendampingan guru tertuang pada poin kedua, yaitu Penguatan kompetensi GTK dalam PJJ melalui Webinar dan pelatihan/ bimtek pendampingan guru bertujuan agar guru memahami konsep dasar pembelajaran jarak jauh, guru mengenal alternatif-alternatif cara pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, guru dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan aplikasi kelas maya dan aplikasi pendukung lainnya, serta guru dapat mengembangkan media pembelajaran berbasis TIK (video infografis, aplikasi mobile, dll). Pendampingan guru dilaksanakan oleh UPT Balai Tekkomdik sebagai unit pelayanan teknis dibawah naungan Dikpora DIY. Pelaksanaan pendampingan dicanangkan dapat membantu dan mendorong guru untuk menciptakan pemahaman baru terkait dengan bagaimana cara guru mengajar, membantu guru untuk memperoleh ide-ide baru, serta untuk memahami apa yang guru butuhkan agar dapat meningkatkan aspek-aspek lain dari cara guru mengajar.

Pendampingan guru merupakan strategi pemerintah daerah yang dilakukan pada kebijakan PJJ. Pendampingan guru memiliki urgensi besar pada masa pandemi Covid-19 menjadi program kebijakan PJJ yang perlu disoroti. Implementasi pendampingan guru jika ditinjau melalui teori Edward III pada aspek komunikasi menjadi penentu keberhasilan pada pencapaian tujuan program kebijakan. Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, apabila setiap pihak yang terlibat bertanggung jawab terhadap

implementasi sebuah kebijakan dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Perintah untuk megimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu.

Program pendampingan guru dalam rangka memberikan dukungan bagi guru atau tenaga pendidik dalam menghadapi proses pembelajaran jarak jauh yang saat ini sedang berjalan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY melalui Balai Tekkomdik menyelenggarakan fasilitasi bagi Guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui Webinar berseri. Pelaksanaan pendampingan guru dilaksanakan melalui program Webinar Seri yang telah dilaksanakan selama tiga bulan setiap minggunya. Pendampingan guru dilaksanakan melalui Webinar berseri yang diadakan melalui *Video conference Zoom* dan kanal *YouTube* Jogjabelajar. Melalui penggunaan *Video conference Zoom* dan *Live Streaming YouTube* memuat lebih banyak peserta dan siaran ulangnya dapat ditonton berulang kali. Materi yang diberikan telah disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi guru menghadapi pembelajaran jarak jauh masa pandemi Covid-19.



Gambar 2. Webinar Seri Pendampingan Guru Kebijakan PJJ

Pelaksanaan pendampingan guru melalui Webinar berseri diadakan dengan penjelasan materi yang dilanjutkan dengan praktik media pembelajaran bagi guru

peserta. Narasumber mayoritas berasal dari Balai Tekkomdik sesuai dengan kompetensi sebagai pengembang teknologi pembelajaran. Secara keseluruhan proses pendampingan guru melalui Webinar Series oleh Balai Tekkomdik DIY mendapatkan respon positif dari peserta dan menyarankan untuk diadakan secara rutin. Dampak dari Webinar Series dapat langsung dirasakan dan terlihat seperti, guru mampu mengaplikasikan materi terkait pola pengajaran PJJ dengan memaksimalkan media pembelajaran. Dampak yang dirasakan guru dapat menjadi bukti tercapainya tujuan pendampingan guru pada masa pandemi Covid-19 di DIY.

Secara keseluruhan pemerintah daerah melalui Dinas Dikpora dan Balai Tekkomdik telah menunjukkan komitmennya dalam memberikan pendampingan guru selama pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pendampingan guru Kebijakan PJJ pada pandemi Covid-19 telah dilaksanakan dengan baik meski memerlukan beberapa perbaikan ke depannya.

Menilai pandemi yang mereda namun tidak menutup kemungkinan untuk dapat terjadi *outbreak*, sektor pendidikan dituntut untuk siap dan terus memanfaatkan kompetensi TIK. Hal ini dapat dilihat dengan perlunya pengadaan pendidikan *hybrid* atau *blended learning*. Pandemi Covid-19 telah mengubah pola belajar yang sangat berbeda dari sebelumnya, proses pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka kini beralih ke pembelajaran jarak jauh. Instansi pendidikan telah berupaya memberikan pelayanan terbaik pada peserta didiknya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dimasa pandemi covid-19, termasuk melalui pendampingan guru. Hal

ini ialah salah satu bentuk dari penerapan revolusi industri 4.0. Meski tidak dapat menggantikan pembelajaran tatap muka sepenuhnya, pemanfaatan teknologi dapat digunakan sebagai metode pembelajaran secara *hybrid learning* atau *blended learning*. Peningkatan kompetensi guru kaitannya dalam penggunaan teknologi yang telah dilaksanakan pada pendampingan Guru dapat digunakan sebagai peralihan pembelajaran *hybrid learning* atau *blended learning*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Program pendampingan guru merupakan strategi pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhan guru pada pelaksanaan Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh. Pendampingan guru dikaji melalui teori Edward III telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru pada pelaksanaan Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh. Indikator pada teori Edward III terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Aspek komunikasi seperti penyaluran, kejelasan, dan konsistensi komunikasi dalam pendampingan guru Kebijakan PJJ pada pandemi Covid-19 terangkum melalui sosialisasi program. Komunikasi memanfaatkan media sosial dengan memaksimalkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait berhasil mengoptimalkan proses penyaluran informasi. Indikator sumber daya terdiri atas aspek manusia, finansial, dan peralatan. Ketersediaan sumber daya secara kualitas dan kuantitas sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada pendampingan guru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Disposisi tercermin melalui komitmen pemerintah daerah dengan memberikan pendampingan guru

pada kebijakan pembelajaran jarak jauh melalui Bimtek dan Webinar. Struktur birokrasi berkaitan dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi pendampingan guru dilaksanakan sesuai tugas, pokok, dan fungsi. Pelaksanaan pendampingan guru sendiri dilaksanakan secara daring dengan Webinar berseri.

Saran

Saran yang diberikan atas pembahsan dan hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Balai Tekkomdik dapat meneruskan program pendampingan guru melalui Webinar dan Bimtek, hal ini berkaitan dengan kebutuhan guru akan kecakapan TIK masa pandemi dan menghadapi pedagogi modern era revolusi industri 4.0.
2. Fungsi koordinasi dan pengawasan Dinas Dikpora DIY dapat diperkuat kembali terlebih dalam menyosialisasikan berbagai program pendampingan guru oleh Balai Tekkomdik. Pendampingan guru sebagai strategi meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajarn untuk berkontribusi mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Rekomendasi Kebijakan

1. Tindaklanjut Pendampingan Guru disesuaikan dengan kebutuhan guru.

Pendampingan guru merasakan dampak langsung dari Webinar yang telah dilaksanakan. Guru juga menyarakan untuk Webinar berseri dilanjutkan. Sehingga perlunya tindaklanjut berupa pengembangan kompetensi lebih dalam berkaitan dengan kompetensi yang dibutuhkan masa pandemi dan pasca-pandemi. Pengembangan media diperlukan

berkaitan dengan jangkauan sasaran. Pendidikan di era revolusi industri 4.0 dan pasca-pandemi Covid-19 menunjukkan pendidikan DIY perlu melaksanakan *hybrid learning* disertai dengan pendampingan oleh pemerintah.

2. Tindaklanjut Alokasi Dana Pendampingan Guru

Alokasi dana Pendampingan Guru sebelumnya dialihkan ke penanganan Covid-19 yang masih tinggi saat itu. Mengingat dengan pandemi Covid-19 yang sudah membaik pengalokasian Pendampingan Guru dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. G Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta :PustakaPelajar.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 1-11.
- Aliyyah, R. R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M., & Tambunan, A. R. S. (2020). The perceptions of primary school teachers of online learning during the COVID-19 pandemic period: A case study in Indonesia. Online Submission, 7(2), 90-109.
- Arifa, F.N. (2020). Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Covid-19. Info Singkat, XII, No. 7/I/Puslit/April/2020.
- Aslan, A., & Zhu, C. (2018). Starting teachers' integration of ICT into their teaching practices in the lower secondary schools in Turkey. Educational Sciences:

- Theory & Practice, 18(1).
- H. M. Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020, Maret 24). Mendikbud terbitkan SE tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat Covid-19. Retrieved from www.kemdikbud.go.id/.
- Norberg, A. (2017). From Blended Learning To Learning Onlife: Icts, Time And Access In Higher Education (Doctoral Dissertation, Umeå University).
- Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidika dan Peran Birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148-178.
- Tahir, A. (2014). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerbit Alfabeta.
- Wagner, P. Brian. (2008). *The Principal's Perceptin of Character Education Implementation in California Middle Schools Based on The Eleven Principles of Character Education*. USA: Proquest LLC.
- World Bank. (2020). *The COVID-19 pandemic: Shocks to education and policy responses*. Diakses pada 20 September 2021 pukul 21.13